

## BAB I

### PENDAHULUAN

Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **A. Latar Belakang Masalah**

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaran pemerintahan daerah. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini telah disempurnakan dengan dikeluarkannya UU No.2 Tahun 2015 dan UU No. 9. Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pada dasarnya perubahan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mensejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah. Perubahan ini untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat.

Dalam salah satu butir Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan

antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara<sup>1</sup>. Hal ini berarti kepemimpinan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, walikota) seharusnya memposisikan diri tidak sekedar pemimpin daerah tersebut, tetapi lebih dari itu yaitu memposisikan diri sebagai pemimpin nasional Indonesia yang sedang bertugas untuk mengurus suatu daerah sebagai bagian yang utuh dari Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ini perlu dilakukan karena kepala daerah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap keutuhan nasional<sup>2</sup>.

Kepala daerah memiliki fungsi yang mampu mewakili keutuhan nasional, sehingga sebagai pemimpin daerah diuntut menjadi seorang pemimpin yang sepak terjangnya tidak lagi mewakili partai politik atau golongan tertentu. Akan tetapi sebagai pemimpin juga memiliki kapasitas sebagai Kepala Daerah yang mempengaruhi daerah tersebut agar menjadi semakin positif dan maju yaitu mengutuhkannya Indonesia.

Namun faktanya, permasalahan tentang pemimpin daerah menjadi isu yang krusial di negara ini. Seorang pemimpin yang baik yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa masih belum terlihat di sebagian besar pemimpin daerah di negara ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah dalam pilkada seorang pemimpin sebagian besar di calonkan oleh partai yang tentu memiliki birokrasi. Dukungan birokrasi penting bagi calon pemimpin dikarenakan hubungannya saling mendukung secara politik, baik dari pihak politisi maupun birokrasi itu sendiri. Politisi membutuhkan birokrasi sebagai mesin politik

---

<sup>1</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 2014. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah, Menimbang huruf: c

<sup>2</sup> Dadang Garnida, SJafri Mangkuprawira, Bomer Pasaribu, A. H. (2011). Peran Kepemimpinan Kepala Daerah Dalam Mewujudkan Sistem Ketahanan Nasional.

dan birokrasi membutuhkan dukungan politisi sebagai sarana penunjang karir<sup>3</sup>. Hal ini terbukti dengan jaranganya pemimpin daerah di Indonesia yang memenangkan sebuah pilkada melalui jalur independent.

Birokrasi yang dimaksud disini adalah birokrasi Partai politik, karena kebanyakan calon pemimpin daerah dicalonkan oleh partai politik yang mempunyai birokrasi, maka hubungan antara calon pemimpin daerah yang dicalonkan oleh partai politik tertentu adalah sangat penting, karena saling mendukung secara politik. Politisi membutuhkan birokrasi sebagai mesin politik, sedangkan birokrasi membutuhkan dukungan politisi sebagai sarana penunjang karir.

Dengan pilkada yang calon pemimpinnya di usung oleh partai atau birokrasi , maka isu yang sering terjadi adalah kepala daerah tersebut kerap di tunggangi oleh kepentingan orang atau kelompok dari birokrasi tertentu. Hal ini sangat mungkin terjadi, karena adanya kekuasaan yang besar dalam birokrasi, dimana kekuasaan tersebut dapat dipergunakan sebagai bentuk intervensi politik oleh kalangan tertentu sekaligus dapat menjadikan birokrasi sebagai instrument atau alat politik yang berguna untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan di dalam pemerintah. Kekuasaan ini pula yang menyebabkan wewenang birokrasi pada lapisan atas lebih besar ketimbang birokrasi lapisan bawah, dan menyebabkan adanya keharusan birokrasi lapisan bawah tunduk pada aturan yang dibuat oleh birokrasi di lapisan atas tersebut<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Rizki Muharlin Rayadi, & Drs. Erman M, M. S. (2011). POLITISASI BIROKRASI PADAPEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (STUDI MOBILISASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2011), 1–14.

<sup>4</sup> Rayadi, R. M., & Erman, M. 2011. POLITISASI BIROKRASI PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (STUDI MOBILISASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2011), 1–14.

Ketidak mampuan seorang pemimpin kepala daerah dalam melawan birokrasi yang mengusung namanya pada saat pilkada tentu menimbulkan efek nyata bagi masyarakat di daerah. Ini dikarenakan pemilihan kepala daerah tidak lagi menjadi sarana yang efektif, terjadi persoalan di banyak segi, banyak yang beranggapan bahwa pemilihan kepala daerah hanyalah sebagai suatu sarana bagi seseorang yang punya kepentingan tertentu untuk meraih kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan rakyat lagi<sup>5</sup>. Akibat yang di timbulkan adalah masyarakat tidak merasakan kemajuan daerahnya secara nyata dan juga memiliki rasa kurang percaya terhadap pemimpinnya sebagaimana tercantum dalam hasil survey Human Development Index (HDI).

Tidak adanya perubahan yang membuat kepercayaan publik terhadap pemimpin daerah menjadi kurang baik, apalagi di tambah dengan pola pikir birokrasi publik yang bororientasi pada kekuasaan, kekurang lenturan kelembagaan serta, misi terlalu kaku dan tidak fokus pada pelayanan public, masih meluasnya praktik-praktik KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme), dan rendahnya penggunaan diskresi<sup>6</sup>. (Sugiyanto, 2013).

Jadi rendahnya penggunaan diskresi ini, mengakibatkan kurang adanya perbaikan dari keempat unsur di atas, atau dengan perkataan lain kurang beraninya kepala daerah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pelayanan publik dapat lebih berkualitas.

Dengan banyaknya kasus pemimpin daerah yang terlibat beberapa kasus pelanggaran hukum mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap tokoh

---

<sup>5</sup> Asmuriyono. (2013). Pemilihan Kepemimpinan Kepala Daerah Visioner Di Kota Surabaya, *11*(1).

<sup>6</sup> Sugiyanto. (2013). PERANAN KEPEMIMPINAN TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI ERA OTONOMI DAERAH. ( [www.stia-asmisololo.ac.id](http://www.stia-asmisololo.ac.id)).

pemimpin daerah. Terbukti dengan hasil pilkada langsung 2005-2007 lebih didominasi wajah baru ketimbang incumbent. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat tidak mempercayai pemimpin sebelumnya dan mencoba dengan memilih pemimpin yang baru dengan harapan agar menjadi lebih baik. Berdasarkan data yang diolah dari Desk Depdagri hasil pilkada langsung 2005-2007 yang menjadi masalah adalah wajah-wajah baru yang menjadi kepala daerah justru tidak terpilih dari parpol melainkan dari pengusaha, LSM, dan purnawirawan sebesar 56,6 %. Yang di khawatirkan adalah dalam kepemimpinannya akan mengutamakan adaptasi terhadap birokrasi pemda terlebih dahulu daripada melayani rakyat<sup>7</sup>. Selain itu ada contoh kasus yaitu kepemimpinan di Jawa Tengah selama satu tahun antara gubernur dengan DPRD yang tidak memiliki sinergi akhirnya menghambat dalam mempercepat keberhasilan pembangunan<sup>8</sup>.

Kejadian demikian memang menjadi hambatan baik bagi perkembangan daerah maupun pemimpin daerah tersebut, dengan hambatan dan gangguan membuat pemimpin daerah menjadi focus untuk membenahan diri sendiri atau daerah nya sendiri. Dengan demikian pemimpin tersebut tidak bisa menunjukkan sebagai pemimpin nasional karena masih berkuat dengan kefanatisannya untuk mengurus daerahnya sendiri.

Menjadi pemimpin di Indonesia memang bukanlah hal yang mudah, hal ini di karenakan menjadi pemimpin di Indonesia berbeda dengan seperti menjadi pemimpin di dunia barat ataupun di asia. Karena di Indonesia berhasil memimpin

---

<sup>7</sup> Riewanto, A. (2007). Kesejahteraan Rakyat, (32), 1–28.

<sup>8</sup> Abdulrahman, W. (2015). MEMBANGUN SINERGITAS EKSEKUTIF-LEGISLATIF DI JAWA TENGAH, *14*(2), 24–41.

secara efektif di suatu daerah belum tentu berhasil memimpin di daerah lain<sup>9</sup>. Agar mampu menjadi pemimpin yang efektif oleh karena itu para pemimpin daerah harus mempunyai kemampuan yang lebih dalam memahami rakyat yang di pimpin. Oleh karena itu, pemimpin secara kontekstual akan lebih efektif apabila pemimpin tersebut memperhatikan nilai, norma dan kepercayaan yang ada pada rakyat yang di pimpinnya<sup>10</sup>. Selain itu pemimpin daerah perlu memiliki sikap meskipun yang bersangkutan dipilih berdasarkan suara langsung rakyat daerahnya dan juga mungkin mewakili partai politik tertentu, namun dirinya sebagai kepala daerah adalah tetap sebagai pemimpin nasional untuk daerah yang sedang dipimpinya.

Karena menurut UU No.23 Tahun 2014 pada pasal 6 menyatakan bahwa Pemerintah pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan dalam pasal 7 ayat 1 menyatakan Pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah, dan pada ayat 2 menyatakan Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Jadi berarti bahwa Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerahnya harus berpikir, bertindak dan berperilaku sebagai pemimpin nasional.

Di sisi lain, pada saat ini masyarakat memiliki minat, semangat dan harapan terhadap pemimpin daerah yang baru di beberapa daerah. Hal ini terjadi

---

<sup>9</sup> Irwanto, D. (2011). An analysis of national culture and leadership practices in Indonesia. *Journal of Diversity Management (JDM)*, 4(2), 41–48.

<sup>10</sup> House, R. J., Hanges, P. J., Javidan, M., Dorfman, P. W., & Gupta, V. (2004). Leadership, culture, and organizations: The GLOBE study of 62 societies. *Beverly Hills, CA: Sage Publications*.

karena kepala daerah tersebut berani melakukan tindakan-tindakan yang tegas namun demi kepentingan masyarakat luas.

Seperti Ibu Tri Risma Harini, Bp. Jarot Saiful Hidayat, dan Basuki Tjahaya Purnama, hal ini terjadi karena kepala daerah tersebut berani melakukan tindakan-tindakan yang tegas namun demi kepentingan masyarakat luas.

Antara lain tindakan yang dilakukan adalah melawan birokrasi yang menekan, mengambil langkah – langkah kebijakan yang bersih dan jujur, serta lebih melayani rakyat. Hal tersebut terbukti dengan maraknya berita baik di media cetak maupun elektronik mengenai hasil kinerja pemimpin daerah yang perlu di apresiasi dengan baik. Dalam lima tahun terakhir ini telah muncul nama-nama kepala daerah reformasional. Nama yang paling menonjol adalah walikota Surabaya, Tri Rismaharini sebagai contoh karena setiap tahun memperoleh berbagai penghargaan dari nasional hingga internasional dalam karirnya sebagai Walikota Surabaya. Tokoh pemimpin seperti inilah yang dibutuhkan di setiap daerah di Indonesia, yaitu pemimpin daerah yang juga sebagai pemimpin nasional karena tidak hanya memberi kemajuan bagi daerahnya namun juga sebagai contoh dan inspirasi bagi seluruh rakyat dan pemimpin di daerah- daerah di seluruh Indonesia. Semakin banyak pemimpin yang memiliki sikap dan jiwa kepemimpinan nasional maka hal tersebut menjadi kunci penting bagi keberlangsungan NKRI.

Menjadi pemimpin yang nasional tentu pemimpin harus memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi ( Kartodirjo (2001) seorang sejarawan senior dari UGM mengungkapkan keprihatinannya terhadap pertikaian antar elit politik di Indonesia. Kartodirjo menilai bahwa etos nasionalisme para elit politik di Indonesia telah menipis, karenanya Kartodirjo menghimbau agar para elit polittik segera mawas diri

dengan mempelajari kembali sejarah pergerakan nasional melalui biografi tokoh-tokoh pergerakan nasional<sup>11</sup>.

Selain itu pentingnya sikap nasionalisme bagi pemimpin adalah cinta terhadap tanah air dan bangsa, berpartisipasi dalam pembangunan, menegakkan hukum dan menjunjung keadilan sosial, memanfaatkan sumberdaya sekaligus berorientasi pada masa depan, berprestasi, mandiri dan bertanggung jawab dengan menghargai diri sendiri dan orang lain, serta siap berkompetisi dengan bangsa lain dan terlibat dalam kerjasama internasional<sup>12</sup>. Sehingga para pemimpin daerah bagi para pemimpin adalah agar pemimpin tersebut memiliki kesadaran dalam memposisikan diri sebagai bagian dari Negara Kesatuan RI yang terdiri dari banyak suku, etnis dan budaya. Selain itu juga memiliki kesadaran sebagai NKRI yang menghilangkan segala bentuk kolonialisme dan penjajahan<sup>13</sup>.

Rasa nasionalisme saja tentu kurang sebagai modal pemimpin, seorang pemimpin juga harus memiliki jiwa kepemimpinan transformasional agar mampu melaksanakan tugas dengan baik. James Mac Gregor Burns mengungkapkan bahwa

*He described it not a set of specific behaviors, but rather an on going process by which "leaders and followers raise one another to higher levels of morality and motivation" Abraham Maslow's Transfoirmational Leadership fits into the higher levels, as if requires a high level of self esteem and self actualization to succesfully be an authentic transformational leader<sup>14</sup>.*

Artinya kepemimpinan bukanlah merupakan sebuah perilaku yang spesifik, melainkan lebih kepada proses bagaimana seorang pemimpin mampu

---

<sup>11</sup> Kusumawardani, A., & Psikologi, B. (2004). Nasionalisme 61, (2), 61–72.

<sup>12</sup> Kusumawardani, A., & Psikologi, B. (2004). Nasionalisme 61, (2), 61–72.

<sup>13</sup> Susanto, H. (2013). Understanding of Regional History and Perception of. *International Journal of History Education*, XIV(1).

<sup>14</sup> Covey, S. (2007). The Transformational Leadership Report. *Transformational Leadership Journal*, 1–19.



meningkatkan moral dan motivasi bagi pengikutnya. Sedangkan menurut Abraham Maslow kepemimpinan dapat mencapai level yang lebih tinggi maka membutuhkan harga diri dan aktualisasi diri yang tinggi agar mampu menjadi pemimpin yang autentik.

*There are four components of transformational leadership, which are :*

#### ***Charisma or idealized influence***

*This is degree to which the leader behaves in admirable ways that cause followers to identify with the leader. Charismatic leaders display convictions, take stands and appeal to followers on an emotional level. This is about the leader having a clear set of values and demonstrating them in every action, providing a role model for their followers. Genuine trust must be built between leaders and followers. Trust for both leader and follower is built on a solid moral and ethical foundation.*

#### ***Inspirational motivation***

*The degree to which the leader articulates a vision that is appealing and inspiring to followers. Leader with inspirational motivation challenge followers with high standards, communicate optimism about future goals, and provide meaning for the task at hand. Followers need to have a strong sense of purpose if they are to be motivated to act. It is also important that this visionary aspect of leadership be supported by communication skills that allow the leader to articulate his or her vision with precision and power in a compelling and persuasive way.*

#### ***Intellectual stimulation***

*The degree to which the leader challenges assumptions, takes risks and solicits followers' ideas. Leaders with this trait stimulate and encourage creativity in their followers. The leader's vision provides the framework for followers to see how they connect to the leader, the organization, each other, and the goal. Once they have this big picture view and are allowed freedom from convention they can creatively overcome any obstacles in the way of the mission.*

#### ***Individualized consideration or individualized attention***

*The degree the leader attends to each follower's needs, acts as a mentor or coach to the follower and listens to the follower's concerns and needs. This also encompasses the need to respect and celebrate the individual contribution that each follower can make to the team (it is the diversity of the team that gives it its true strength). This approach not only educates the next generation of leaders, but also fulfills the individual's need for self-actualization, self-fulfillment, and self-worth. It also naturally propels followers to further achievement and growth<sup>15</sup>.*

---

<sup>15</sup> Bass, B. M., Avolio, B. J., Jung, D. I., & Berson, Y. (2003). Predicting unit performance by assessing transformational and transactional leadership. *The Journal of Applied Psychology*, 88(2), 207–218. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.2.207>

Kepemimpinan transformasional memiliki empat komponen penting yaitu idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, dan individualized consideration. Idealized influence atau karisma yaitu bagaimana pemimpin memiliki perilaku yang bisa meyakinkan, memiliki pendirian dan terlihat menarik bagi pengikutnya sehingga para pengikutnya memiliki rasa percaya dan akhirnya terbangun rasa saling percaya antara pimpinan dan pengikutnya dengan moral dan etika sebagai dasar hubungan. Inspirational motivation merupakan bagaimana visi seorang pemimpin agar menarik dan inspiratif sehingga mampu dikomunikasikan ke pengikutnya dengan baik dan membuat para pengikut termotivasi dan mampu memaknai tugas yang diberikan. Intellectual stimulation diartikan sebagai pemimpin menerima aspirasi ide dan saran dari pengikut kemudian memberikan tantangan bagi para pengikut dengan tujuan mendorong dan merangsang kreativitas pengikut untuk melihat bagaimana mereka terhubung ke pemimpin, organisasi, satu sama lain, dan tujuan sehingga bisa mengatasi segala hambatan dalam menjalankan misi. Dan yang terakhir individualized consideration yaitu kehadiran pemimpin di tengah tengah pengikut sebagai mentor atau pelatih, kemauan mendengarkan segala kondisi dan menghormati pengikutnya dan mampu memberikan kekuatan sehingga kebutuhan aktualisasi diri, pemenuhan diri, dan harga diri yang mendorong pengikutnya agar lebih berprestasi dan bertumbuh. Seorang pemimpin daerah yang mampu memiliki komponen- komponen di atas di harapkan mampu memberikan perubahan bagi wilayah yang di pimpinnya.

Kemudian memiliki rasa nasionalisme yang baik, dan jiwa kepemimpinan bagi pemimpin daerah tentu merupakan modal yang sangat baik. Namun apabila kepala daerah tersebut mampu menyatukan kemampuan sebagai kepala daerah yang secara politis membawa daerahnya sebagai daerah yang tidak

terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, itulah yang disebut dengan Political Nationalism Leadership Engagement.

Menurut Schildkraut, D. J. :

*Political engagement have supplied an impressive range of findings that highlight both the individual and institution factors that affect political participation and opinion about the responsiveness and trustworthiness of the political system<sup>16</sup>.*

Political engagement menjadi bagian penting untuk dimiliki oleh kepala daerah karena political engagement memberikan temuan yang luar biasa dalam menyoroti faktor baik individu maupun institusi yang memiliki efek terhadap partisipasi politik dan pendapat tentang tanggapan dan kepercayaan terhadap sistem politik. Ketika seseorang pemimpin memiliki political engagement maka diharapkan seorang pemimpin juga mampu menciptakan sebuah sistem politik yang peka terhadap kebutuhan rakyat dimana saat ini rakyat Indonesia membutuhkan bukti untuk memunculkan kepercayaan dan keyakinan mereka terhadap para pemimpin dan sistem politik yang benar benar memberikan kemajuan bangsa.

Dalam undang-undang otonomi daerah, status Kepala Daerah pada dasarnya wakil pemerintah pusat dari negara Indonesia untuk daerah tersebut. Artinya, kepemimpinan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, walikota) seharusnya memposisikan diri tidak sekedar pemimpin daerah tersebut, tetapi lebih dari itu yaitu memposisikan sebagai pemimpin nasional Indonesia yang sedang bertugas untuk mengurus suatu daerah sebagai bagian yang utuh dari Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>16</sup> Schildkraut, D. J. (2005). *The rise and fall of political engagement among latinos: The role of identity and perceptions of discrimination*. *Political Behavior*, 27(3), 285–312.  
<https://doi.org/10.1007/s11109-005-4803-9>.

Selain itu, posisi kepala daerah tersebut kemudian menuntut seorang pemimpin daerah yang sepak terjangnya tidak lagi mewakili partai politik tertentu, tetapi kapasitas sebagai Kepala Daerah adalah kapasitas yang mempengaruhi daerah tersebut menjadi semakin positif yaitu meng-utuhkan Indonesia. Karena kepala daerah disamping sebagai pemimpin daerah dan juga sebagai pemimpin Nasional jadi meskipun ybs dipilih berdasarkan suara langsung rakyat daerahnya dan juga mungkin mewakili partai politik tertentu, namun dirinya sebagai kepala daerah adalah tetap sebagai pemimpin nasional untuk daerah yang sedang dipimpinnya.

Namun faktanya menunjukkan bahwa banyak Kepala Daerah telah dan sedang mengkondisikan gerak langkahnya hanya sebatas pada fanatisme kedaerahan dan kepentingan politik dan golongan tertentu. Namun di sisi lain ada fakta yang positif bahwa beberapa Kepala Daerah tertentu mampu melakukan mobilisasi pengaruh positif dari satu daerah ke daerah lain. Terbangunnya diri sebagai kepala daerah yang adalah pemimpin nasional untuk daerah tertentu merupakan sesuatu yang sangat penting demi keutuhan NKRI. Menyatunya kemampuan Kepala Daerah yang secara politis membawa daerahnya sebagai daerah yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, itulah yang disebut dengan Political Nationalism Leadership Engagement. Penelitian ini ingin mengkaji secara teoritis dan empiris terhadap Political Nationalism Leadership Engagement kepala daerah seluruh Indonesia.

Oleh karena itu sangat penting untuk melihat bagaimana Political Nationalism Leadership Engagement para pemimpin daerah pada saat ini sehingga dapat memberikan gambaran dan medapatkan solusi terbaik bagi bangsa Indonesia. Penelitian ini ingin mengkaji secara teoritis dan empiris terhadap Political Nationalism Leadership Engagement kepala daerah seluruh Indonesia.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian diatas maka dapat di identifikasikan pokok-pokok masalah tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Kepala daerah merupakan wakil pemerintahan pusat yang bertugas memimpin suatu daerah. Selain berupaya memajukan daerah tersebut, kepala daerah juga mengemban tugas yang sangat penting dimana dirinya harus mampu memosisikan diri sebagai kepala daerah yang memiliki jiwa dan semangat kepemimpinan secara nasional. Permasalahan yang terjadi adalah bahwa sebagian besar kepala daerah justru belum mampu menunjukkan kepemimpinan yang secara integral memajukan daerah sekaligus membawa misi nasionalisme dalam kepemimpinannya. Namun ada juga yang bagus sesuai dengan maksud Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu kepala daerah yang memimpin Indonesia didaerah yang kebetulan mempercayakan kepada yang bersangkutan. Di sisi lain, kepala daerah seringkali justru masih mengutamakan kepentingan pribadi dan kepentingan golongan atau partai yang mengusungnya. Berbagai kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah banyak yang bermuara pada permasalahan kepentingan. kepentingan ini adalah kepentingan pribadi, kepentingan partai politik yang mengusungnya dan kepentingan golongan tertentu. Padahal peran kepala daerah berdampak pada keutuhan nasional sehingga kepentingan rakyat pun diabaikan. Uraian di atas menggambarkan adanya dinamika dalam pilitical Nationalism Leadership Engagement para kepala daerah di Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas. Padahal peran kepala daerah berdampak pada keutuhan nasional<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Dadang Garnida, SJafri Mangkuprawira, Bomer Pasaribu, A. H. (2011). Peran Kepemimpinan Kepala Daerah Dalam Mewujudkan Sistem Ketahanan Nasional.

Berdasarkan uraian di atas, masalahnya adalah bagaimana kecenderungan Political Nationalism Leadership Engagement Kepala Daerah seluruh Indonesia?.

Kedua, Peran penting kepala daerah bagi suatu daerah dan juga sekaligus bagi Indonesia itu menjadikan posisi penting dan ini yang bersangkutan harus mampu menampilkan profil pejabat pemerintah yang senantiasa mawas diri dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi yang terwujud melalui sikap cinta tanah air, mau berpartisipasi dalam pembangunan, menegakkan hukum, menjunjung keadilan social, memanfaatkan sumberdaya sekaligus berorientasi pada masa depan, berprestasi, mandiri dan bertanggung jawab dengan menghargai diri sendiri dan orang lain, serta siap berkompetisi dengan bangsa lain dan terlibat dalam kerjasama internasional<sup>18</sup>. Ternyata begitu banyaknya peran yang harus diambil sebagai kepala daerah. Karena pentingnya, maka masalahnya adalah variabel atau dimensi atau indikator apa yang paling menentukan terbentuknya Political Nationalism Leadership Engagement Kepala Daerah seluruh Indonesia?.

Ketiga, Jiwa kepemimpinan juga menjadi dasar utama bagi kepala daerah. *Adopting a leadership microlevel perspective provides a more comprehensive understanding of leadership.* Artinya; Mengadopsi perspektif microlevel kepemimpinan memberikan pemahaman kepemimpinan yang lebih komprehensif<sup>19</sup>. Dengan mengimplementasikan gaya kepemimpinan yang tepat akan membantu kepala daerah meningkatkan kesadaran kolektif yang dapat membantu tercapainya tugas utamanya sebagai pejabat Negara di daerah tertentu. Engagement merupakan salah satu factor penting dalam kepemimpinan.

---

<sup>18</sup> Kusumawardani, A., & Psikologi, B. (2004). Nasionalisme 61, (2), 61–72.

<sup>19</sup> Breevaart, K., Bakker, A., Hetland, J., Demerouti, E., Olsen, O. K., & Espevik, R. (2014). *Daily transactional and transformational leadership and daily employee engagement. Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 87(1), 138–157. <https://doi.org/10.1111/joop.12041>.

Seorang pemimpin yang engage akan lebih menunjukkan kinerja yang baik. *The Key leadership of engage is based on three important things: Truth, Trust and cooperation.* Artinya kunci kepemimpinan yang engage didasari pada tiga hal penting yaitu kebenaran, kepercayaan dan kerjasama<sup>20</sup>. Dengan mempertimbangkan kapasitas sebagai pemimpin nasional, maka seharusnya seorang kepala daerah memiliki Political Nasionalism Leadership Engagement. Oleh karena itu, dengan fenomena yang ada bagaimanakan gambaran perbedaan latar belakang kepala daerah tersebut mempengaruhi kondisi political nasionalism leadership engagement yang dimiliki oleh kepala daerah di Indonesia?.

Keempat, Political nasionalism leadership engagement merupakan keterpautan langkah-langkah politis dalam mempengaruhi perubahan paradigma daerah yaitu unsur-unsur masyarakat yang tidak hanya berorientasi kedaerahan tapi juga nasional. Political nasionalism leadership engagement akan terwujud ketika kepala daerah mampu menunjukkan perilaku engage (*behavioral engagement*) yaitu perilaku yang memiliki jiwa kebangsaan dan tidak diskriminatif. Political nasionalism leadership engagement juga akan terwujud ketika kepala daerah mampu menunjukkan *attitudinal engagement* yaitu evaluasi mereka terhadap respon dan kepercayaan sistem politik melalui tiga hal yaitu kepercayaan, komitmen dan pengalaman. Masalahnya adalah apakah keterpautan politis atas perubahan paradigma partai ke arah lebih maju melampaui era transformasi mempengaruhi Political Nationalism Leadership Engagement Kepala Daerah seluruh Indonesia?.

Kelima, Menurut Bass, B. M., Avolio, B. J., Jung, D. I., & Berson, Y.

*The adaptif leadership style that is able to reflect the social value is tranformational leadership that formed by existence idealized inflence, inspirational motivation, intellectual stimulation and individualized considerantion*<sup>21</sup>.

<sup>20</sup> Denham, C. R. (2006). The 3 Ts of Leadership Engagement: Truth, Trust, and Teamwork. *J Patient Safety*, 2(3), 162–170. <https://doi.org/10.1097/01.jps.0000235389.46772.3b>

<sup>21</sup> Bass, B. M., Avolio, B. J., Jung, D. I., & Berson, Y. (2003). Predicting unit performance by assessing transformational and transactional leadership. *The Journal of Applied Psychology*, 88(2), 207–218. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.2.207>

Artinya gaya kepemimpinan adaptif yang mampu merefleksikan nilai social adalah transformational leadership yang terbentuk oleh adanya idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation dan individualized consideration. Factor penting lainnya adalah kesadaran kepala daerah dalam memposisikan diri sebagai bagian Negara kesatuan RI yang terdiri dari banyak suku, etnis dan budaya serta kesadaran akan pentingnya menghilangkan segala bentuk kolonialisme dan penjajahan di bumi pertiwi.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan, dimensi dan indicator manakah yang paling berperan membentuk political nasionalism leadership engagement. Jadi masalahnya adalah apakah benar bahwa gaya kepemimpinan kepala daerah mempengaruhi Political Nationalism Leadership Engagement Kepala Daerah seluruh Indonesia?.

Keenam, Penelitian ini akan melibatkan seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia. Konteks ini berkaitan erat dengan factor demografi. berbagai penelitian telah membuktikan adanya peran demografi dalam setiap hasil penelitian. Oleh karena itu perlu juga dilihat bagaimana peran masing-masing factor demografi berikut gambarannya dalam political nasionalism leadership engagement. Masalahnya adalah apakah terdapat perbedaan kategori latar belakang demografi kepala daerah, jika dibedakan dalam hal *Political Nationalism Leadership Engagement* Kepala Daerah seluruh Indonesia?.

### **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah merupakan bagian utama yang akan dikaji penulis setelah memperhatikan faktor-faktor yang teridentifikasi. Identifikasi masalah dibatasi oleh



penulis pada masalah penelitian sehubungan dengan kecenderungan “*Political Nationalism Leadership Engagement* menurut Ezra 1:1-5, Nehemia 2:1-20 dan Ester 4:12-17,” Setelah penulis membaca dan membandingkan dengan kitab-kitab lain yang ada dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian baru, ketiga kitab tersebut di atas cenderung mempunyai variabel yang kuat dan dominan mewarnai Kepala Daerah seluruh Indonesia

#### **D. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari:

Pertama, Bagaimana kecenderungan *Political Nationalism Leadership Engagement* Kepala Daerah seluruh Indonesia?,

Kedua, Dimensi atau indikator manakah yang paling dominan menentukan terbentuknya *Political Nationalism Leadership Engagement* Kepala Daerah seluruh Indonesia?, dan

Ketiga, Apakah terdapat perbedaan dalam hal *Political Nationalis Leadership Engagement* Kepala Daerah se Indonesia, jika dibedakan berdasarkan Kategori latar belakangnya?.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini ingin mengetahui hasil kajian secara teoritis dan empiris terhadap *Political Nationalism Leadership Engagement* Kepala Daerah seluruh Indonesia yang diharapkan dapat memberi kontribusi konkrit bagi banyak pihak guna terciptanya NKRI yang utuh kuat dan tidak tergoyahkan baik dari dalam maupun dari luar negeri, yaitu :

Pertama, Bagi Pemerintah Pusat, sebagai masukan bagi Pemerintah Pusat, agar dapat mengambil satu kebijakan yang tepat untuk keutuhan NKRI.

Kedua, Bagi Pemerintah Provinsi, memberikan masukan bagi Pemerintah Provinsi, agar dapat mendorong dan mempercepat kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat untuk keutuhan NKRI.

Ketiga, Bagi Kepala Daerah ,mengingat dan memotivasi dirinya terhadap pentingnya keutuhan NKRI, sehingga para.Kepala Daerah (Bupati/Walikota) seluruh Indonesia dapat menyatukan pola pikir, kebijakan dan perilakunya disamping sebagai pemimpin daerah juga sebagai pemimpin nasional.

Keempat, Diharapkan dengan pola pikir, kebijakan dan perilaku Kepala Daerah dapat mempengaruhi masyarakat yang dipimpinnya dalam membawa daerahnya menjadi satu kasatuan yang utuh secara politis dengan NKRI.

Kelima, Bagi peneliti, mendapatkan pengetahuan yang tak ternilai untuk bekal kehidupan pribadi dan guna menyumbangkan pemikiran-pemikiran kepada pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mewujudkan NKRI yang utuh dan kuat, di samping sebagai salah satu persyaratan akademis guna mencapai gelar Doktor of Ministry di HITS.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan disertasi ini disusun secara sistematis. Bab I berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, indentifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, sistematika penulisan.

Bab II berisikan landasan teori yang menjelaskan *Positive Organizational Behavior* Yang Mengoptimalkan *Human Capital* Karyawan Industri Tekstil, kemudian dilanjutkan dengan kerangka berpikir dan hipotesis penelitian.

Bab III menjelaskan metodologi penelitian yang meliputi tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampling, teknik pengumpulan data, instrumen dan teknik analisa data.

Bab IV mengungkapkan deskripsi data, pengujian persyaratan analisis, pengujian hipotesis dan pembahasannya, serta keterbatasan penelitian.

Bab V mengungkapkan kesimpulan, dan saran-saran terhadap hasil penelitian.

Bab VI merupakan bab terakhir yang mengungkapkan implikasi terhadap hasil penelitian.